

Transparency and Accountability: The Future of Ethical Governance

Ilya Avianti

Ketua Dewan Audit/Anggota Dewan Komisioner OJK

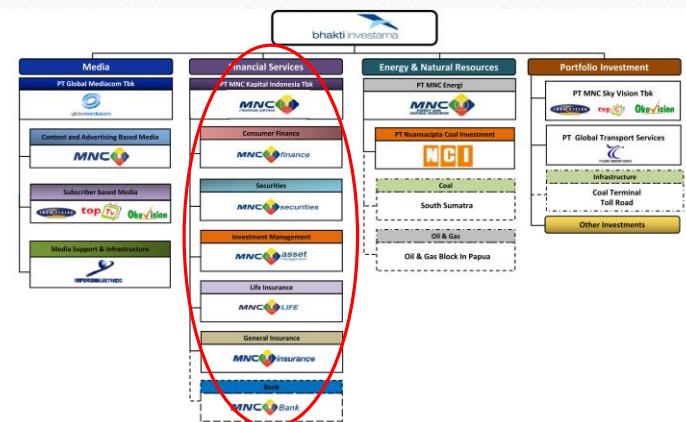
Nusa Dua, 7 September 2016

Konglomerasi Keuangan Nasional

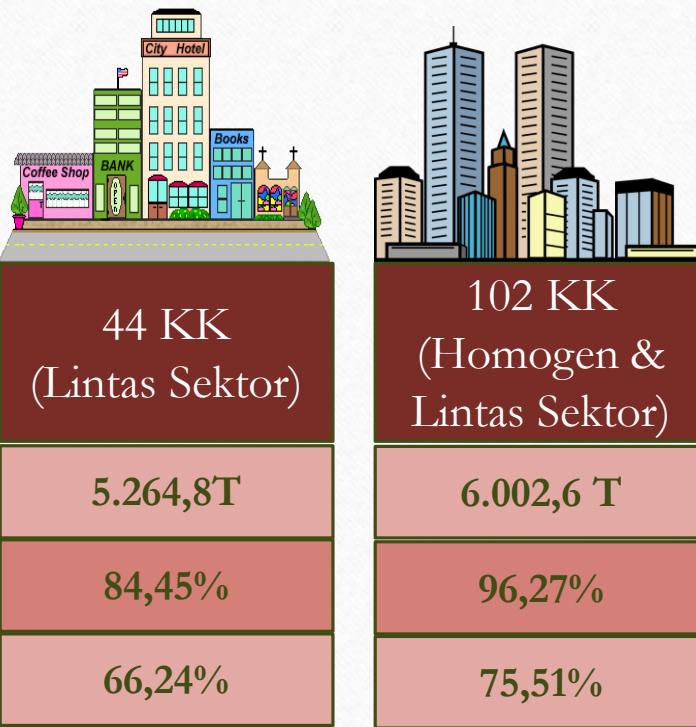


Konglomerasi Keuangan (KK) merupakan Lembaga Jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Lebih dari 80% aset 44 Grup KK dikuasai oleh “hanya” 11 grup besar.



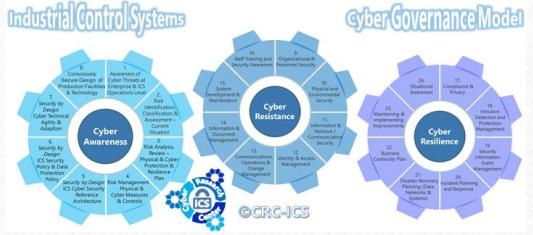
Total Aset
% terhadap Total Aset Perbankan
% terhadap Total Aset SJK



Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan TW 1 – 2016, DPMK OJK



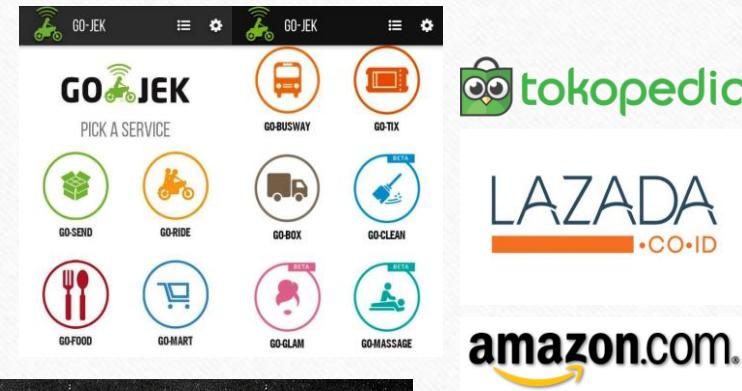
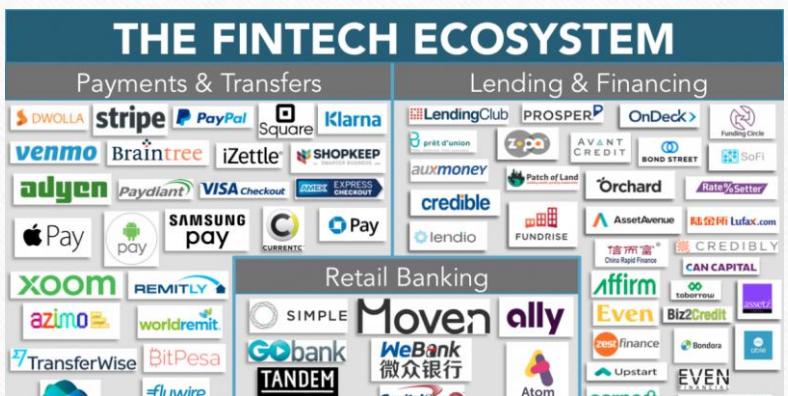
Total
Exposure IJK
Rp15,5 Ribu T



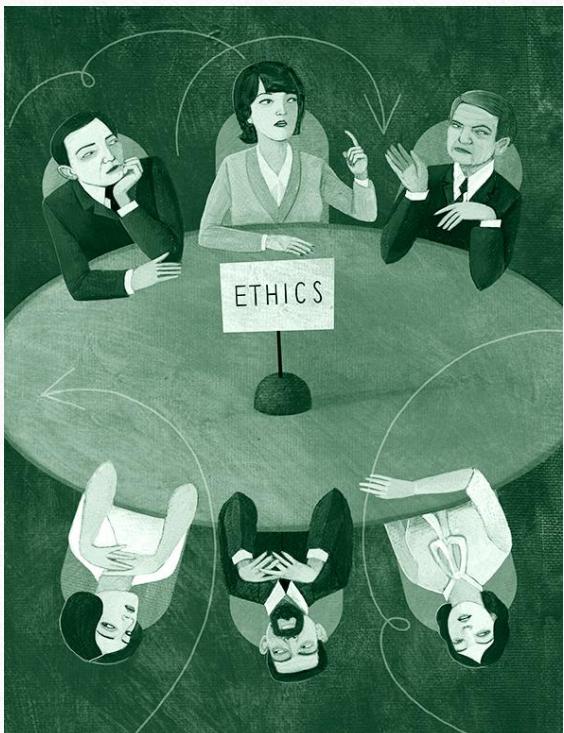
Teknologi Informasi

Perkembangan bisnis global berbasis IT, elektronik dan cyber adalah tantangan tersendiri bagi Auditor Internal.

Bagaimana kesiapan para Auditor Internal mengimbangi perkembangan teknologi dan perekonomian?



Ethics & Governance



"Make sure everything is done ethically. Within reason, of course."

Ethics & Governance

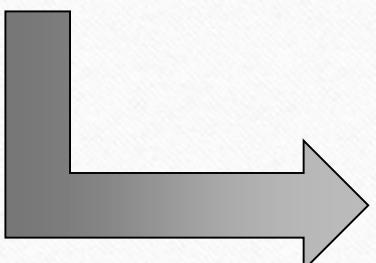
Governance Awards



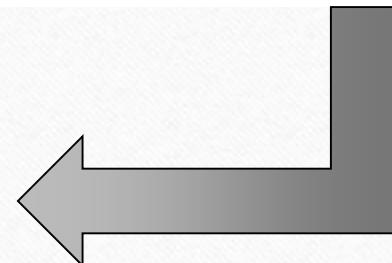
Ethics & Governance



RULES



GOVERNANCE





Global Business Ethics Survey 2016

Pressure to compromise standards

SPAIN	10%
MEXICO	13%
JAPAN	15%
CHINA	20%
SOUTH KOREA	22%
GERMANY	22%
UNITED STATES	22%
UNITED KINGDOM	22%
ITALY	24%
FRANCE	30%
RUSSIA	33%
INDIA	40%
BRAZIL	47%
MEDIAN VALUE	22%

Observed Misconduct

JAPAN	15%
SPAIN	21%
GERMANY	26%
SOUTH KOREA	28%
UNITED KINGDOM	29%
UNITED STATES	30%
MEXICO	33%
FRANCE	33%
ITALY	34%
CHINA	34%
INDIA	40%
BRAZIL	43%
RUSSIA	45%
MEDIAN VALUE	33%

Reported Misconduct

INDIA	82%
UNITED STATES	76%
UNITED KINGDOM	71%
BRAZIL	64%
MEXICO	63%
JAPAN	61%
ITALY	59%
FRANCE	53%
CHINA	50%
GERMANY	50%
SPAIN	46%
SOUTH KOREA	41%
RUSSIA	37%
MEDIAN VALUE	59%

Retaliation

CHINA	29%
MEXICO	31%
FRANCE	33%
RUSSIA	34%
JAPAN	34%
ITALY	35%
SOUTH KOREA	36%
BRAZIL	37%
SPAIN	43%
GERMANY	50%
UNITED STATES	53%
UNITED KINGDOM	63%
INDIA	74%
MEDIAN VALUE	36%



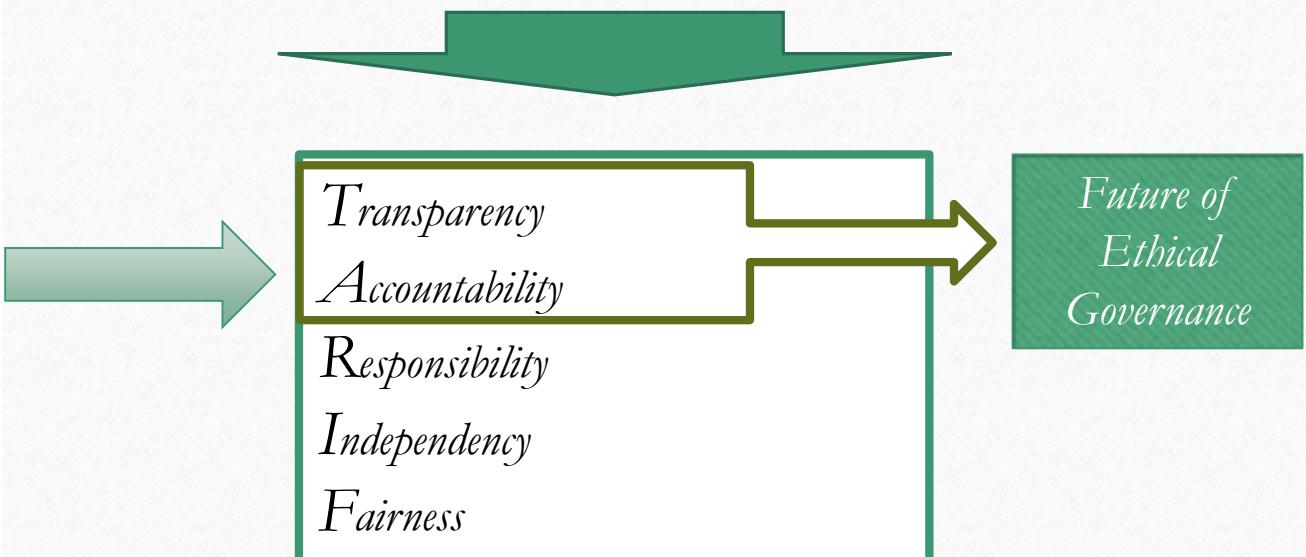
13 Negara
dan 1000
Pegawai tiap
negara
koresponden



Transparency, Accountability & Ethical Governance



Ethical Governance

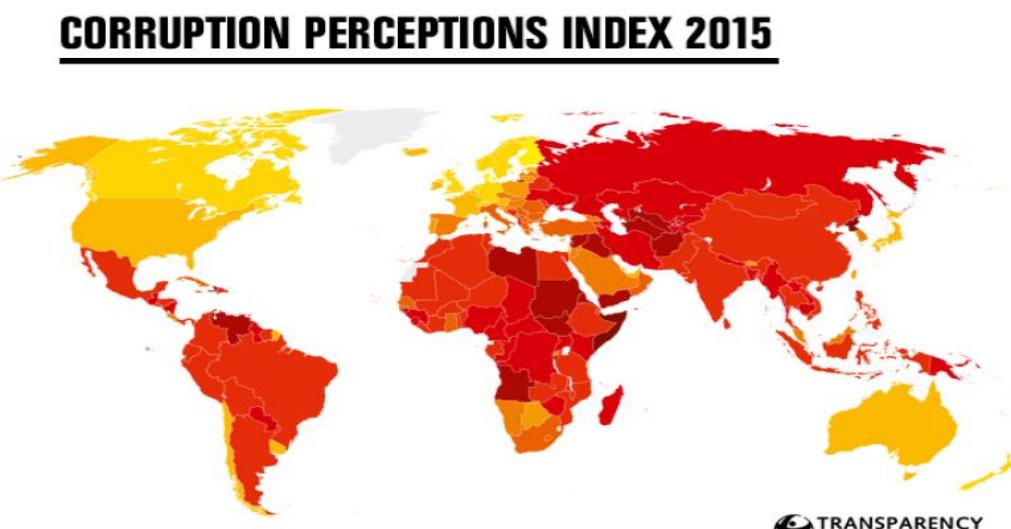




Ethical Governance

Agency Theory:

“Kebutuhan terhadap *good governance* sejatinya muncul ketika *stakeholders* menyerahkan seluruh kepentingannya untuk dikelola oleh *agents* yang pada saatnya kelak pengelolaan itu dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Akuntabilitas), sesuai dengan mandat yang diberikan”

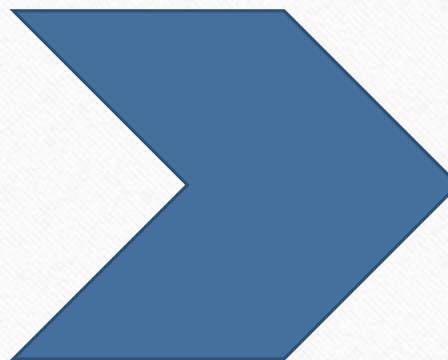


CPI 2012	CPI 2013	CPI 2014	CPI 2015	Rank 2015	Country
90	91	92	91	1	Denmark
90	89	89	90	2	Finland
88	89	87	89	3	Sweden
87	86	84	85	8	Singapore
49	50	52	50	54	Malaysia
37	35	38	38	76	Thailand
32	32	34	36	88	Indonesia
34	36	38	35	95	Philippines
31	31	31	31	112	Vietnam

Peran Auditor Internal & IIA



The Institute of
Internal Auditors



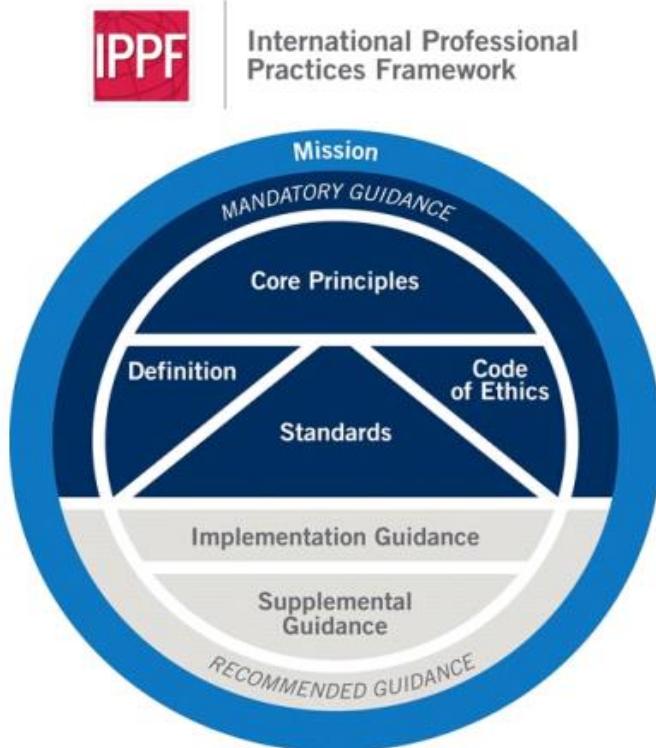
Peran Auditor Internal & IIA



Peran Auditor Internal:

- Mengedepankan *ethical governance*
- Menjadi konsultan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
- Memiliki kualitas yang diharapkan:
quality as value for money, quality as fit for purpose, quality as transformation, quality as perfection, & quality as excellence

Peran Auditor Internal & IIA

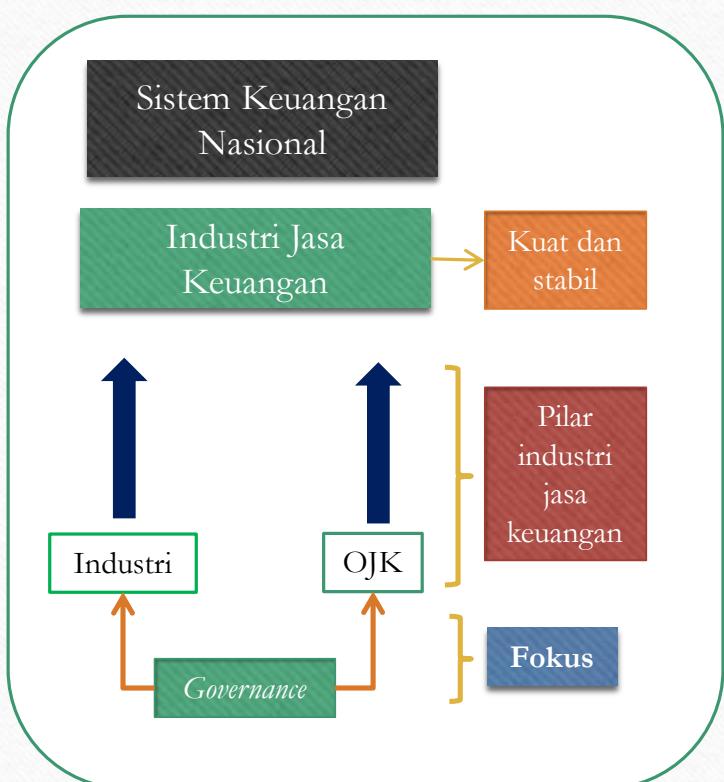


Peran IIA:

- Peningkatan kompetensi auditor.
- Evaluasi & Inisiasi kebijakan governance.
- Membangun *ethical culture* bagi anggotanya
- IPPF: *code of ethics* sebagai salah satu unsur utama yang wajib untuk dimiliki auditor



Bersama Menegakkan *Governance*



Kontributif

Mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan

Inklusif

Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan



Terima Kasih